

**SKRIPSI**

**ADOPSI *FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL* OLEH  
JEPANG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS  
KESEHATAN BAGI PEROKOK PASIF**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

**RUTH JOAN WISHAPRILA**

**1510111099**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)**

Pembimbing :

**Dr. Najmi, S.H., M.H**

**Sri Oktavia, S.H., M.Sc. Ph.D**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

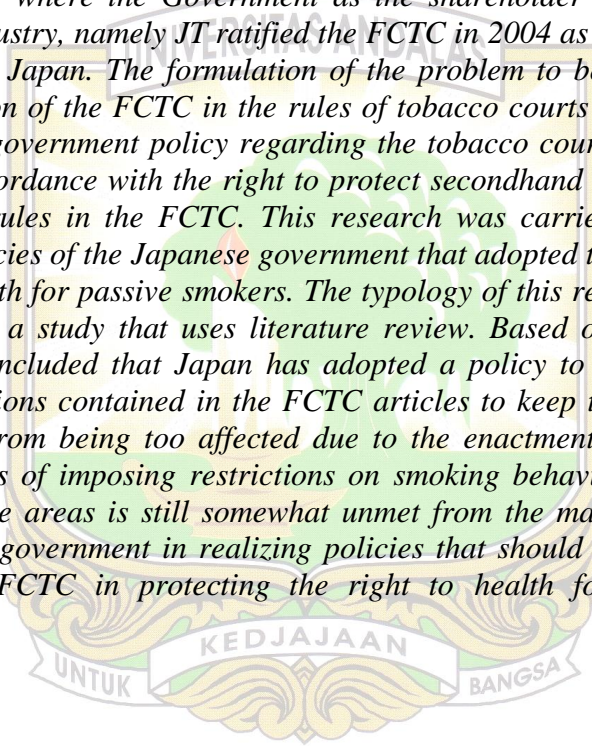
**2019**

**FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL ADOPTION BY  
JAPAN RELATED TO PROTECTION OF HEALTH RIGHTS FOR PASSIVE  
SMOKER**

(Ruth Joan Wishapрила, 1510111099, International Law, Faculty of Law, Andalas  
University, 62 pages, 2019)

**ABSTRACT**

*The existence of negative implications of cigarette consumption on health, regulation of restrictions on smoking behavior is needed. The form of WHO cares is formally announced FCTC as a legal umbrella for world tobacco control. Japan as a developed country, where the Government as the shareholder of the third largest global tobacco industry, namely JT ratified the FCTC in 2004 as a legal umbrella for tobacco control in Japan. The formulation of the problem to be examined is First, How is the adoption of the FCTC in the rules of tobacco courts in Japan. Secondly, has the Japanese government policy regarding the tobacco court since ratifying the FCTC been in accordance with the right to protect secondhand smoke or SHS when compared to the rules in the FCTC. This research was carried out descriptively, describing the policies of the Japanese government that adopted the FCTC in relation to the right to health for passive smokers. The typology of this research is normative juridical, which is a study that uses literature review. Based on the results of the study it can be concluded that Japan has adopted a policy to ratify the FCTC by diluting the provisions contained in the FCTC articles to keep the interests of their tobacco industry from being too affected due to the enactment of tobacco control policies. The status of imposing restrictions on smoking behavior in Japan and in creating smoke-free areas is still somewhat unmet from the many efforts that have been made by the government in realizing policies that should be harmonized with Article 8 of the FCTC in protecting the right to health for passive smokers.*



**ADOPSI *FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL* OLEH  
JEPANG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS  
KESEHATAN BAGI PEROKOK PASIF**

(Ruth Joan Wishapрила, 1510111099, Hukum Internasional, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 62 Halaman, Tahun 2019)

**ABSTRAK**

Adanya implikasi negative dari konsumsi rokok terhadap kesehatan, maka regulasi pembatasan perilaku merokok sangat dibutuhkan. Bentuk kepedulian WHO yaitu diresmikannya FCTC sebagai payung hukum pengendalian tembakau dunia. Jepang sebagai Negara maju, dimana Pemerintah sebagai pemegang saham atas Industri tembakau global terbesar ketiga yakni JT meratifikasi FCTC pada tahun 2004 sebagai payung hukum pengendalian tembakau di Jepang. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah *Pertama*, Bagaimana adopsi FCTC dalam aturan pengadilan tembakau di Jepang. *Kedua*, Apakah kebijakan pemerintah Jepang terkait pengadilan tembakau sejak meratifikasi FCTC sudah sesuai dengan hak atas perlindungan kesehatan bagi perokok pasif atau SHS jika dibandingkan dengan aturan didalam FCTC. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu Menggambarkan kebijakan pemerintah Jepang yang mengadopsi FCTC dikaitkan dengan hak atas kesehatan bagi perokok pasif . Typologi penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Jepang mengambil kebijakan untuk meratifikasi FCTC dengan mengencerkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal FCTC untuk menjaga agar kepentingan industri tembakau mereka tidak terlalu terdampak karna pemberlakuan kebijakan kontrol tembakau. Status pemberlakuan pembatasan perilaku merokok di Jepang dan dalam menciptakan kawasan bebas asap rokok masih terbilang belum terpenuhi dari banyaknya upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan yang seharusnya diselaraskan dengan pasal 8 FCTC dalam melindungi hak atas kesehatan bagi perokok pasif.